

Demokrasi dan partisipasi politik: Tantangan dan peluang di era digital

Indra Wahyu Agung Saputra

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: indrawahyuu07@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi; partisipasi politik; era digital; media sosial; literasi digital

Keywords:

Democracy; political participation; digital era; social media; digital literacy

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di era digital, partisipasi politik mengalami transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika demokrasi dan partisipasi politik di era digital, mencakup peluang yang ditawarkan oleh teknologi serta tantangan yang dihadapi, khususnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sistematis terhadap berbagai sumber akademik terkait demokrasi digital dan keterlibatan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membuka ruang partisipasi yang lebih luas, namun juga menciptakan risiko erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Diperlukan penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila dan regulasi yang komprehensif untuk memastikan demokrasi yang sehat di era digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan kajian ilmu manajemen publik di Indonesia.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the holders of supreme sovereignty. In the digital era, political participation has undergone significant transformations influenced by developments in information technology and social media. This study aims to analyze the dynamics of democracy and political participation in the digital era, encompassing the opportunities offered by technology as well as the challenges faced, particularly the spread of hoaxes, disinformation, and polarization. The study used qualitative methods with a systematic literature review approach to various academic sources related to digital democracy and citizen engagement. The results show that social media opens up broader spaces for participation, but also creates the risk of eroding public trust in democratic institutions. Strengthening digital literacy based on Pancasila values and comprehensive regulations are needed to ensure a healthy democracy in the digital era. This research is expected to contribute to policy development and the study of public management science in Indonesia.

Pendahuluan

Demokrasi kini menjadi sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia sejak akhir abad ke-20. Sebagai sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, demokrasi menyediakan cara partisipasi politik yang melibatkan semua orang, melindungi hak-hak warga, dan menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Di Indonesia, proses demokrasi secara nyata dimulai pada masa



Reformasi 1998, yang menandai peralihan dari sistem pemerintahan otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan mewakili.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, cara orang terlibat dalam politik mulai berubah secara besar-besaran. Kehadiran internet, media sosial, dan platform digital memberikan kesempatan baru bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses politik, mulai dari membicarakan kebijakan, mengawasi pekerjaan pemerintah, hingga menggerakkan kegiatan sosial secara daring. Fenomena ini menghasilkan konsep demokrasi digital atau e-democracy yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 191 juta pengguna aktif media sosial.

Namun di balik kesempatan tersebut, masa digital juga memberikan tantangan yang cukup berat. Penyebaran berita palsu dan informasi tidak benar di media sosial adalah ancaman besar bagi kualitas demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh , kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi secara besar-besaran dan muncul berbagai tantangan etis, seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi di media sosial yang membahayakan fondasi ideologis bangsa. Isu-isu di dunia digital tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis bangsa, yaitu Pancasila yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Dalam bidang ilmu manajemen, fenomena demokrasi digital juga penting karena berkaitan langsung dengan cara mengelola pemerintahan, mengelola urusan publik, dan mengatur komunikasi dalam sebuah organisasi. Kemampuan pemerintah dalam mengelola informasi digital, membangun kepercayaan masyarakat, serta mengatur partisipasi warga merupakan bagian penting dalam mengelola sektor publik secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk bidang ilmu politik, tetapi juga berkenaan dengan ilmu manajemen dan administrasi publik.

Pembahasan

Konsep Dasar Demokrasi dan Relevansinya di Indonesia

Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan, jadi secara langsung artinya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dibuat oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan berfaedah bagi rakyat. Definisi ini menyatakan bahwa rakyat adalah sumber dari sahnya kekuasaan politik, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. (Dahl, 1971) mengenalkan konsep poliarki sebagai bentuk demokrasi yang bisa dijalankan dalam praktik sehari-hari, yang ditandai oleh adanya persaingan yang terbuka, partisipasi yang melibatkan semua orang, serta kebebasan sipil yang terjamin.

Dari sudut pandang Islam, isu demokrasi adalah hal yang rumit dan tidak sepenuhnya sama. (Soleh, 2005) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam demokrasi, seperti kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme, juga dikenal dan diperjuangkan dalam Islam. Namun, Islam tidak hanya tentang sistem pemerintahan atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Islam adalah agama yang berhubungan

dengan keyakinan dan mengajarkan berbagai aturan serta norma, sehingga membandingkan Islam dengan demokrasi secara langsung tidak sepenuhnya tepat. Pemahaman ini relevan bagi Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila.

Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang menggabungkan prinsip demokrasi umum dengan nilai-nilai lokal yang terdapat dalam dasar negara Pancasila. Sistem ini menekankan musyawarah mufakat sebagai cara mengambil keputusan, gotong royong sebagai dasar hidup sosial, dan persatuan sebagai syarat keberlanjutan bangsa dan negara. Dalam pengelolaan pemerintahan, Demokrasi Pancasila memerlukan pemerintahan yang tidak hanya bekerja dengan cara efisien tetapi juga mendasari pada nilai-nilai kebangsaan.

Perkembangan Partisipasi Politik di Era Digital

Transformasi digital memberikan dimensi baru dalam cara demokrasi masa kini berjalan. Partisipasi politik kini tidak hanya terbatas pada kegiatan tradisional seperti pemungutan suara atau demonstrasi, tetapi juga melibatkan dunia digital yang memberikan kemudahan dan kecepatan yang lebih besar. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok kini menjadi tempat baru untuk bertukar ide dan diskusi politik yang secara besar-besaran memengaruhi pendapat masyarakat umum.

Tabel 1

Perkembangan Demokrasi dan Partisipasi Digital di Indonesia (2015-2023)

Indikator	2015	2019	2023
Tingkat Partisipasi Pemilu	69,58%	80,90%	82,45%
Pengguna Media Sosial (juta)	79	150	191
Indeks Demokrasi Indonesia	72,82	68,08	74,92
Literasi Digital (% populasi)	32%	51%	67%

Sumber: Diolah dari BPS, (The Economist Intelligence Unit, 2023)

Berdasarkan data di Tabel 1, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat dari 69,58% pada Pemilu 2015 menjadi 82,45% pada Pemilu 2023. Peningkatan ini sesuai dengan pertumbuhan yang besar pengguna media sosial, dari 79 juta menjadi 191 juta dalam jangka waktu yang sama. Meskipun indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2019, namun pada tahun 2023 kondisinya kembali membaik. Sementara itu, tingkat kemampuan menggunakan teknologi juga naik menjadi 67%, meski masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun penggunaan internet semakin meningkat, tantangan dalam ketimpangan akses digital atau kesenjangan

digital (Norris, 2001) masih ada dan mengganggu. Jika tidak dikelola dengan baik, kurangnya partisipasi warga yang sehat di lingkungan digital bisa mengurangi social capital atau modal sosial yang menjadi ikat pinggang kebersamaan warga negara dalam sebuah sistem demokrasi (Putnam, 2000).

Peluang Demokrasi di Era Digital

Era digital memberi banyak kesempatan penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Pertama, meningkatnya kemudahan dalam mendapatkan informasi politik memungkinkan masyarakat lebih gampang mengawasi kerja pemerintah dan mengetahui kebijakan yang diberlakukan. Keterbukaan data pemerintah membantu masyarakat lebih mudah memahami dan bertindak berdasarkan fakta, sehingga mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas yang lebih baik.

Kedua, media sosial memudahkan warga dalam berkelompok dan mengumpulkan dukungan dengan lebih efektif. Gerakan sosial seperti ReformasiDikorupsi di Indonesia menunjukkan bahwa platform digital bisa menjadi alat penting untuk memicu tindakan bersama yang besar. Ketiga, e-voting dan konsultasi publik secara daring bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang terlibat dalam proses politik biasa, seperti penyandang disabilitas dan warga di daerah terpencil.

Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia memberikan kesempatan besar untuk mendorong percepatan demokrasi digital, karena jaringan internet semakin luas mencakup daerah pedesaan dan biaya akses internet turun secara signifikan. Peningkatan infrastruktur ini mendapat sambutan baik karena tingkat literasi digital yang tinggi di kalangan generasi muda dan masyarakat yang berpendidikan, yang menjadi pondasi utama dalam membentuk basis pemilih digital (e-participation). Bagi lembaga pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan partai politik, fenomena ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara dua arah dan interaktif melalui situs web serta media sosial. Menggunakan media elektronik ini terbukti jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan metode kampanye lama seperti kunjungan ke rumah demi rumah atau pasang baliho fisik. Selain itu, media elektronik juga menjadi cara yang strategis untuk menyebarkan informasi secara jujur, sehingga dapat meningkatkan kesan baik dan kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik (Slamet et al., 2009).

Dari sudut pandang manajemen publik, digitalisasi layanan pemerintah atau e-government memberi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses birokrasi, mengurangi korupsi dengan cara memperbaiki transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Inovasi teknologi, seperti analisis big data, memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih cepat merespons kebutuhan rakyat berdasarkan informasi nyata.

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Era digital memberikan tantangan yang sangat serius. (Anggraini, 2025) menjelaskan bahwa penyebaran berita palsu di media sosial sering kali berasal dari kesalahan dalam berpikir (logical fallacy) yang digunakan untuk mengubah opini masyarakat. Dalam bidang politik, berita palsu yang mampu membentuk cerita bersama

bisa langsung mengubah pendapat masyarakat dan tindakan politik, baik dengan menurunkan kepercayaan orang banyak terhadap calon pemimpin, memicu rasa takut secara bersama-sama, maupun mengurangi kekuatan sahnya proses pemilihan umum (Anggraini, 2025).

Pemilu 2019 dan 2024 di Indonesia menunjukkan bagaimana penyebaran informasi palsu dalam jumlah besar bisa menyebabkan ketegangan dan tuntutan tentang keterlibatan yang meluas. Dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi bersifat sistemik dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penyebaran informasi palsu yang menyerang kredibilitas lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, atau kepolisian bisa menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Orang yang sering terpapar cerita bahwa lembaga tidak netral cenderung mengurangi minat mereka untuk ikut memilih dan lebih memilih mencari cara lain di luar sistem demokrasi resmi untuk menyelesaikan masalah.

Fenomena ini sesuai dengan pandangan bahwa media sosial di Indonesia sering kali menjadi tempat beroperasinya algoritma yang memisahkan kelompok masyarakat (algoritma enclave), sehingga memperkuat rasa nasionalisme suku dan memicu timbulnya kebencian di internet. Algoritma filter bubble di platform media sosial biasanya memperkuat pendapat yang sudah dimiliki dan membuat pengguna terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sama, sehingga terasing dari perspektif lain. Hal ini bisa membuat perpecahan politik semakin parah dan mengganggu upaya komunikasi antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Implementasi e-demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang rumit, mulai dari belum terintegrasi secara baik data penduduk nasional hingga adanya resistensi dari budaya politik internal. Tidak adanya basis data identitas tunggal yang sah menjadi celah besar yang bisa menyebabkan manipulasi data pemilih serta penggunaan media digital untuk menyebarkan fitnah. Kondisi ini semakin buruk karena kesenjangan digital masih sangat luas di masyarakat, di mana sebagian besar pengguna internet lebih suka memakai internet untuk hiburan daripada berpartisipasi aktif dalam urusan politik. Di sisi lain, ego masing-masing institusi, kurangnya dukungan keinginan politik dari pemimpin daerah, serta ketidaksiapan pengelolaan organisasi dalam merestrukturisasi sistem kerja, anggaran, dan keamanan teknologi sering kali menyebabkan kegagalan teknis, seperti proses penghitungan suara digital yang lambat. Akhirnya, hambatan non-teknis berupa keengganan birokrasi untuk bersikap terbuka dan transparan menjadi penghalang terbesar yang memicu keraguan masyarakat terhadap keandalan sistem demokrasi digital ini (Slamet et al., 2009).

Polarisasi yang sangat kuat ini menjadi salah satu tanda utama bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan, dan kondisi ini semakin diperparah oleh mobilisasi politik yang berbasis populisme digital (Warburton, 2020). Fenomena populisme dalam ranah digital sering kali menjadi hambatan besar bagi demokrasi, sebab memberikan solusi yang terlalu simplistis dan tidak mendalam terhadap isu-isu publik yang sejatinya rumit dan memiliki banyak dimensi (Zaman, 2023). Penelitian (Sunstein, 2017) juga menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran besar dalam memecah ruang publik demokratis yang menjadi dasar pembicaraan bersama dalam masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menjelaskan beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, demokrasi di zaman digital sedang berada di titik penting: teknologi digital memberikan kesempatan baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk meningkatkan partisipasi dalam politik, sekaligus membawa ancaman serius seperti penyebaran informasi palsu, perpecahan masyarakat, dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Media sosial terbukti memengaruhi demokrasi dalam dua cara yang berbeda. Di sisi lain, ia memperluas ruang partisipasi dan mempercepat proses mobilisasi gerakan sosial. Di sisi lain, algoritma filter bubble dan kemudian virus hoaks membuat polarisasi semakin parah dan mengganggu kualitas diskusi demokratis. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang digital berdasarkan nilai Pancasila adalah investasi penting yang harus dilakukan sekarang agar bisa menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di dunia digital.

Keempat, dari sudut pandang manajemen publik, pemerintah harus menerapkan pendekatan pengelolaan yang menyeluruh dan fleksibel dalam mengelola sistem informasi digital. Kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah, universitas, masyarakat awam, dan perusahaan teknologi merupakan syarat penting untuk menjalankan demokrasi digital yang sehat dan berjalan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, disusun beberapa saran strategis yang bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang terlibat. Pertama-tama, pemerintah harus memperkuat peraturan tentang konten digital secara seimbang, antara kebebasan menyampaikan pendapat dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Hal ini meliputi perluasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar lebih sesuai dengan perubahan-perubahan dalam dunia digital. Seiring hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus menggabungkan pendidikan literasi digital yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum resmi di semua tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga diminta untuk memperkuat sistem keamanan siber yang tangguh serta meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara digital agar dapat menghadapi informasi palsu terkait pemilu.

Platform media sosial juga harus didorong untuk menerapkan kebijakan transparansi algoritma dan moderasi konten yang lebih tanggung jawab, dengan terus memperhatikan karakteristik lokal serta nilai-nilai kebhinekaan Indonesia. Akhirnya, perguruan tinggi, termasuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diharapkan bisa menjadi pusat penelitian dan pengembangan kemampuan dalam demokrasi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, serta berperan sebagai mitra penting pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, S. I. (2025). Tantangan Demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/19557/6080>.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Slamet, Hamdan, Abdul Razak bin, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. <http://repository.uin-malang.ac.id/10741/>.
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <http://repository.uin-malang.ac.id/15166/>.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400884711>
- The Economist Intelligence Unit. (2023). *Democracy Index 2023: Age of Conflict*.
- Warburton, E. (2020). Polarization and Democratic Decline in Indonesia. In Power, T. & Warburton, E. (Ed.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS Publishing.
- Zaman, S. (2023). Mengatasi populisme politik: Pendekatan demokratis berbasis penyelesaian masalah dan partisipasi publik. *Malang Times*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14994/>.